KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bisa Ganggu Pemberantasan Korupsi: Konflik Internal KPK Kudu Segera Diakhiri
Tanggal : Minggu, 03 September 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Bisa Ganggu Pemberantasan Korupsi

Konflik Internal KPK Kudu Segera Diakhiri

ANGGOTA Pansus Hak Angket KPK Ahmad Sahroni punya catatan khusus atas keterangan Direktur Penyidikan KPK Brigjen Aris Budiman yang dibeberkan di rapat Pansus, Selasa lalu. Kata politisi Nasdem ini, keterangan Aris menunjukkan ada konflik yang sudah sangat tajam antarpenyidik di internal KPK.

"Terbukti nyata ada konflik internal yang tajam antara penyidik senior tertentu, bersama kelompoknya yang selama ini mendominasi dan powerful di KPK, dengan penyidik lainnya, terutama yang berasal dari Polri. Ini sangat memprihatinkan," kata Sahroni dalam keterangannya, kemarin.

Dia mendesak KPK agar segera mengatasi konflik internal itu. Jika tidak, dia khawatir konflik itu akan mengganggu agenda KPK dalam memberantas korupsi.

"Kondisi ini harus segera diakhiri karena dapat mengganggu agenda pemberantasan korupsi. Konflik ini juga rawan dibajak kepentingan tertentu di luar kepentingan negara dan rakyat," pintanya.

Dari keterangan Aris Budiman, sambungnya, juga diketahui ada dugaan potensi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik senior KPK. Harusnya, penyidik senior juga sama perannya dengan penyidik lain dan tak boleh melampaui kewenangan.

"Keberadaan kelompok ini (penyidik senior) kerap mendominasi dan powerful. Bahkan, melampaui kewenangan komisioner," beber anggota Komisi III DPR ini.

Dia juga mengkritik KPK terkait pemutaran rekaman pemeriksaan Miryam Haryani di persidangan Tipikor, beberapa waktu lalu. Berdasarkan keterangan Aris Budiman, rekaman itu sudah diedit dan tak utuh.

"Rekaman yang diputar dalam persidangan Miryam, diakui Direktur Penyidikan, tidak utuh. Video itu sudah dipenggal-penggal dan secara sengaja ditayangkan sepotong-sepotong sehingga tidak menggambarkan fakta pemeriksaan yang sebenarnya," ucapnya.

Sahroni juga memberi catatan atas banyaknya kasus mandek. Banyak orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tak juga disidangkan atau dilimpahkan ke pengadilan. ■ REN